

Persepsi Politik Etnis

(Studi Kasus Masyarakat Mendawai di Pangkalan Bun
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)



Okky Rahman

Ilmu Pemerintahan

PERSEPSI POLITIK ETNIS

(Studi Kasus Masyarakat Mendawai di Pangkalan Bun
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)

Okky Rahman

Ilmu Pemerintahan

ABSTRACT

Fall of the New Order was in 1998, the establishment of law about decentralization is to strengthen political identity in Indonesia. Indonesia was trying to adopt democracy system and autonomy both local and central government. Democracy is also emerging social and politic problems, where the political situation tends to be fragmentation in the ethnic identity. Ethnic commonly used by the elite groups to mobilize political power of their groups.

The aims of this research is to analyze how the perception of Mendawai society in Pangkalan Bun West Kotawaringin Central Borneo Province towards politic, in term of culture and social perspective. The assumption of the researcher is the differences of culture and social condition build up the social regulation. Theoretically, social regulation regarding ideology, religion, economic, politic, language, education, culture and social norm will lead to social conflicts and ethnic stereotypes. The method in this research uses phenomenology qualitative research and source data used are primary and secondary data. Data collection technique uses depth-interview, observation, and documentation. Moreover, data analysis technique in this research using interactive analysis model, to identify several important factors that effecting political perception of Mendawai society.

The hypothesis of this research is ethnicity profoundly affect politic perception in the society. Ethnicity considered as the basis of critical component for policy making, such as, enthusiastic of society to participate in the election, money politics, vulnerable effected, and political parties do not provide political education to the society.

Key words: *Perception, politic, ethnic and politic identity.*

ABSTRAK

Jatuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998, pembentukan hukum tentang desentralisasi adalah untuk memperkuat identitas politik di Indonesia. Indonesia berusaha untuk mengadopsi sistem demokrasi dan otonomi baik pemerintah daerah maupun pusat. Demokrasi juga muncul masalah sosial dan politik, di mana situasi politik cenderung terfragmentasi dalam identitas etnis. Etnis yang biasa digunakan oleh kelompok elit untuk memobilisasi kekuatan politik dari kelompok mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Mendawai di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap politik, dalam hal budaya dan perspektif sosial. Asumsi peneliti adalah perbedaan budaya dan kondisi sosial membangun pranata sosial. Secara teoritis, regulasi sosial mengenai ideologi, agama, ekonomi, politik, bahasa, pendidikan, budaya dan norma sosial akan menimbulkan konflik sosial dan stereotip etnis. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi dan sumber data kualitatif yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, untuk mengidentifikasi beberapa faktor penting yang mempengaruhi persepsi politik masyarakat Mendawai.

Hipotesis dari penelitian ini adalah etnis sangat mempengaruhi persepsi politik di masyarakat. Etnisitas dianggap sebagai dasar dari komponen penting untuk pengambilan kebijakan, seperti antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, politik uang, rentan dipengaruhi, dan partai-partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Persepsi, politik, etnis dan politik identitas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya perbedaan baik perbedaan suku atau etnis, agama, ras, golongan dan aliran-aliran kepercayaan serta bahasa dan

kebudayaan yang terkandung dalam perbedaan tersebut (Arianto, 2012). Berdasarkan data BPSN pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa, 2.500 bahasa dan 6 agama serta berbagai

kepercayaan yang tersebar di Indonesia. Pluralisme membuat kondisi masyarakat heterogen dan bervariasi, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, psikologi dan budaya.

Hal tersebut yang mempengaruhi perilaku ataupun tingkahlaku politik masyarakat pada momen politik nantinya, sebab hal-hal yang melatarbelakangi akan berimplikasi pada bangunan pengetahuan dan preferensinya kemudian (Mahdalena, 2012: 7).

Kekuasaan dan kewenangan elit politik lokal tak diimbangi dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan secara akademik maupun secara khusus mengenai pendidikan politik oleh partai politik. Tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan oleh elit politik di daerah untuk meraih kekuasaan dengan menambahkan aroma-aroma etnis dan atau agama tertentu yang ada di suatu daerah (Taum, 2006).

Politik identitas menjadi predikat yang melekat dalam membahas pandangan politik etnis baik secara individu maupun kolektif (Haboddin, 2012). Selain itu politik identitas menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena dalam proses politik yang memanfaatkan etnis dan atau agama untuk meraih tujuan atau kekuasaan politik, seringkali dilanda konflik sosial

yang disebabkan oleh faktor sosial yang ada dalam masyarakat dan jumlah keterwakilan politik pada etnis dan agama, serta tuntutan kesejahteraan yang dipastikan akan muncul saat menyusun strategi politik. Pasca Orde Lama sistem politik di Indonesia semakin semerbak beraroma agama dan kedaerahan (etnisitas). Tuntutan yang mengharuskan “putera daerah” menjadi kepala daerah muncul, ditingkat lokal asas legitimasi dalam struktur politik didasari dengan politik identitas (Jumadi dan Yakoop, 2013: 18).

Etnis Mendawai yang berinduk pada Suku Dayak Ngaju, merupakan populasi etnis terbanyak di banding etnis lainnya yang ada di Pangkalan Bun, yaitu 41,24% dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat (Sensus Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah, 2010). Etnis Mendawai adalah etnis asli dan tertua yang mendiami Pangkalan Bun. Etnis Mendawai memiliki bahasa, sistem sosial dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik (Sulaiman, 2008).

Hal tersebut yang membentuk pola pikir masyarakat Etnis Mendawai, baik untuk menjaga kelangsungan atau bertahan hidup, menjaga tradisi dari derasnya modernisasi yang masuk dan juga pola pikir atau cara mereka memandang politik di era demokrasi, globalisasi dan

modernisasi saat ini. Perbedaan tersebut yang menjadi hal penting bagi penulis untuk diteliti, karena dapat dimanfaatkan oleh elit lokal untuk kepentingan politik dan berpotensi besar terjadi konflik baik internal (sesama etnis) atau eksternal (dengan etnis lainnya). Minimnya kesadaran terhadap pluralisme menjadi pemicu konflik, masalah seperti ini dapat dimanfaatkan oleh elit politik.

Kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan fragmentasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang politik suatu kelompok masyarakat (etnis), riset ini dianggap penting karena etnisitas banyak dijadikan sebagai instrumen atau kepentingan politik.

Multikulturalisme merupakan pola pikir yang menuntut kesediaan untuk menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama tanpa memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, gender dan agama (Buchari, 2014). Buchari juga menyatakan bahwa faktor heterogenitas merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan yang didalamnya terdapat faktor geografis, demografis, sosial masyarakat dan juga kondisi masyarakat secara kategorial. Hal ini merupakan kajian yang menarik bagi

penulis untuk menjadikan Pangkalan Bun serta masyarakat Etnis Mendawai sebagai lokasi dan objek penelitian. Studi ini membahas tentang asumsi masyarakat terhadap politik oleh masyarakat Etnis Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Kerangka Teori

1. Persepsi

Menurut Wittig (dalam Putri, 2014) persepsi adalah proses menginterpretasikan stimulus oleh seseorang (*perception is the process by which a person interprets sensory stimuli*), persepsi muncul dari beberapa bagian pengalaman sebelumnya. Sedangkan menurut William James (dalam Putri, 2014), persepsi terbentuk atas dasar kata-kata yang diperoleh di lingkungan yang diserap oleh panca indera serta sebagian lainnya diperoleh dari ingatan kita dan kemudian diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita peroleh. Sejalan dengan yang dikemukakan Kasali (dalam Putri, 2014), faktor-faktor lain yang juga menentukan persepsi, yaitu latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita-berita yang berkembang.

2. Politik

Politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari sistem dalam kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik (Budiardjo, 2008). Dari definisi tersebut, Budiardjo juga mengatakan bahwa terdapat kekuasaan didalamnya, yaitu perilaku manusia untuk memengaruhi orang lain.

3. Etnis

Etnis biasanya dikaitkan dengan isu minoritas dan hubungan kekuasaan. Hal tersebut berkembang dengan kecenderungan membicarakannya dalam konteks sebuah unit sub-nasional (Ardiansyah, 2004: 264-265). Etnis adalah sesuatu yang bersifat kesukuan atau bersifat etnik (Partanto dan Barry, 2001: 162). Menurut Haboddin (2012), etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan identifikasi diri dan askrpsi sosial. Identitas etnis sulit diubah karena pemahaman ini dibangun di atas pemahaman persamaan darah (kelahiran), warna kulit dan kepercayaan yang menyangkut suku, ras, nasionalitas dan kasta.

4. Politik Identitas

Politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus didalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial (Buchari, 2014: 19). Menurut Castells (dalam Buchari, 2014: 19) politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Sedangkan menurut Hill (dalam Buchari, 2014: 19-20) politik identitas mengacu kepada praktik dan nilai politik yang berdasarkan berbagai identitas politik dan sosial.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara holistik pada latar dan individu (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1997: 3). Sedangkan fenomenologi berkaitan dan mempengaruhi sudut pandang, sikap,

persepsi dan bahkan perilaku orang atau sekelompok orang yang memaknainya. Fenomenologi adalah suatu studi untuk memberikan gambaran tentang suatu arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu mengenai suatu konsep tertentu (Polkinghorne, dalam Herdiansyah, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu masyarakat Mendawai yang ada di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi tersebut karena faktor heterogenitas merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan, yang didalamnya terdapat faktor geografis, demografis, sosial masyarakat dan juga kondisi masyarakat secara kategorial. Pangkalan Bun merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman tersebut.

Sedangkan masyarakat Mendawai ialah karena memiliki bahasa, sistem sosial dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik. Kemajemukan yang ada di Pangkalan Bun memungkinkan terjadinya gesekan antara masyarakat sesama Mendawai maupun masyarakat Mendawai dengan non-Mendawai.

Strategi yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan strategi pengambilan Sampel

yang Sejenis dengan Sampel Bola Salju atau Berantai. Karena dalam strategi Sampel yang Sejenis menggambarkan suatu kelompok tertentu secara mendalam, serta dengan wawancara terbuka mengenai isu yang terfokus pada kelompok dengan sampel lima (5) hingga delapan (8) orang. Penulis membagi dua kriteria masyarakat yaitu masyarakat formal dan non-formal. Masyarakat formal ialah masyarakat yang memimpin atau menjadi panutan masyarakat seperti kepala adat, kepala RT/RW dan sebagainya dan disebut dengan tokoh masyarakat. Sedangkan masyarakat non-formal ialah masyarakat umum yang tidak tergolong dalam tokoh masyarakat. Hal tersebut dipilih karena sudah dapat menggambarkan suatu kelompok, yaitu Etnis Mendawai. Dari pembagian tersebut, penulis menentukan delapan (8) orang informan kunci yang terdiri dari tiga (3) orang tokoh masyarakat dan lima (5) orang masyarakat Mendawai.

Dari cara pengumpulannya, secara garis besar penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan dari cara pengumpulan datanya menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang dipakai adalah model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Hasil dan Analisis

Persepsi Masyarakat Mendawai Terhadap Politik Berdasarkan Aspek Latar Belakang Budaya

Dari arti politik yang diberikan masyarakat Mendawai, etnisitas sangat berpengaruh terhadap persepsi politik masyarakat. Suku ataupun etnis merupakan komponen penting untuk diperhatikan sebagai landasan berfikir pembuatan kebijakan terutama ditingkat lokal, agar kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, terutama masyarakat etnis.

Di sisi partisipasi politiknya, Ada korelasi jawaban masyarakat etnis yang sebagian besar menjawab pemilihan umum dengan tingginya partisipasi politik, korelasi jawaban tersebut berbanding lurus. Di luar faktor lain seperti politik uang dan sebagainya. Artinya, masyarakat etnis cukup antusias merayakan pesta demokrasi. Hubungan antara etnis dan politik dapat dilihat dengan munculnya perilaku politik yang positif dari masyarakat etnis. Sisi negatifnya, antusiasme masyarakat etnis dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan.

Persepsi Masyarakat Mendawai Terhadap Politik Berdasarkan Aspek Pengalaman Masa Lalu

Keadaan politik lokal, etnisitas tidak berpengaruh terhadap politik sumber daya manusia. Latar belakang pendidikan menjadi salah satu penyebab kurangnya porsi putera daerah menjadi wakil rakyat di daerahnya sendiri. Selain itu, konglomerat dan etnisitas menjadi tolak ukur suhu politik lokal.

Masyarakat etnis sudah dapat memberikan pandangan terhadap dinamika politik di daerahnya. Masyarakat masih mudah untuk dipengaruhi dengan politik uang. Dan peran konglomerat sangat berpengaruh besar terhadap hal tersebut. Keadaan ekonomi global juga memberi dampak, yaitu situasi politik lokal yang semakin labil. Kurangnya persatuan masyarakat etnis disebabkan karena adanya dikotomi kepentingan politik, yang kemudian membuat kondisi politik lokal menjadi tegang karena kurang harmonisnya hubungan etnis dapat dimanfaatkan oleh elit politik.

Persepsi Masyarakat Mendawai Terhadap Politik Berdasarkan Aspek Nilai-nilai yang Dianut

Minimnya pendidikan dan atau pengetahuan politik masyarakat yang

masih tergolong menengah ke bawah menyebabkan masyarakat etnis sangat membutuhkan pendidikan ataupun sosialisasi politik. Belum semua partai politik memberikan pendidikan politik, beberapa partai politik yang sudah melaksanakan masih berskala kecil sehingga masyarakat belum seluruhnya mendapatkan pendidikan politik.

Persepsi Masyarakat Mendawai Terhadap Politik Berdasarkan Aspek Berita-berita yang Berkembang

Dari pengertian politik yang diberikan masyarakat dapat diketahui manfaat-manfaat politik yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu manfaat tersebut adalah adanya wadah untuk menyampaikan aspirasi bagi masyarakat etnis. Selain itu, masyarakat etnis mulai memahami politik dan mereka ingin lebih diperhatikan sebagai wujud dari keberadaan mereka.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa terhadap data yang diperoleh dari informan kunci dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap politik dipengaruhi oleh etnisitas. Hal ini karena kebijakan-kebijakan politik dibuat dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian kebijakan-kebijakan tersebutlah yang menjadi perhatian dan dirasakan oleh masyarakat etnis. Dari situlah muncul asumsi-asumsi masyarakat etnis yang menggambarkan seperti apa keadaan politik yang sebenarnya terjadi di daerah. Inilah sebab mengapa suku ataupun etnis menjadi komponen penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2. Partisipasi politik Masyarakat Mendawai masih tergolong pasif atau sempit karena mereka menganggap partisipasi politik hanya dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Namun hal tersebut berkorelasi dengan rendahnya tingkat golongan putih (golput) pada setiap pemilihan umum. Rendahnya angka golput merupakan sisi positif yang muncul atas hubungan antara etnis dan politik. Di sisi lain, hal ini pula yang dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
3. Dinamika politik lokal di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh dua hal, yaitu konglomerat dan etnisitas (Etnis

Mendawai). Peran konglomerat memberi pengaruh besar karena kemampuannya yang dapat mengendalikan suhu politik dengan caranya sendiri, terutama untuk melancarkan kepentingan-kepentingannya. Berkaitan dengan Etnis Mendawai yang merupakan etnis asli Pangkalan Bun, masih mudah untuk dipengaruhi dengan politik uang karena faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Selain itu, rendahnya porsi putera daerah di pemerintahan menjadi salah satu temuan, yaitu etnisitas tidak berpengaruh terhadap politik sumber daya manusia.

4. Masyarakat Etnis Mendawai sebagian besar belum mendapatkan pendidikan politik karena belum semua partai politik memberikan pendidikan politik yang sebenarnya wajib bagi partai politik.
5. Berdasarkan hasil analisa terhadap data yang diperoleh dari informan kunci terhadap manfaat politik dapat disimpulkan bahwa manfaat tersebut sama dengan manfaat yang dirasakan masyarakat pada umumnya, yaitu adanya wadah untuk menyampaikan aspirasi.

Buku

- Brannen, Julia. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Daftar Pustaka

- Herdiansyah, Haris. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Isbandi, Adi. 1994. *Psikologi Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Jalaludin. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Publik Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mardiansyah, Arrochman. 2004. *Politik Transisi Pasca Soeharto; Negara Bangsa dan Konflik Etnis: Nasionalisme vs Etno-nasionalisme*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Marzali, Amri. 2003. *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini; Perbedaan Etnis Dalam Konflik: Sebuah Analisis Sosio-Ekonomi Terhadap Kekerasan di Kalimantan*. Jakarta: Leiden.
- Moleong, L. J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2008. *Metodologi Penelitian Komunikasi: Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. 2004. *Politik Transisi Pasca Soeharto: Reformasi Politik, Demokrasi dan Integrasi Nasional*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Nurhasim, Moch., dkk. 2005. *Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurjaman, Asep. 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Partanto, P. A. dan Barry, M. D. Al. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pruitt, Dean G. dan Rubin, Jeffrey Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setyaningrum, Arie. 2004. *Politik Transisi Paca Soeharto: Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Siagian, S. P. 1989. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sjaf, Sofyan. 2014. *Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia: Aspek-Aspek Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: PT Temprint.
- Spradley, J. P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Spradley, J. P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. 2012. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Triyono, Lambang. 2004. *Politik Transisi Pasca Soeharto; Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menuju Kemandirian Daerah*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial Yogyakarta*. Yogyakarta: Andi.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Internet

- Al-Kumayi, Sulaiman. 2011. *Islam Bubuhan Kumai: Perspektif Varian Awam, Nahu, dan Hakekat*, diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/1273/> pada tanggal 16 September 2015 pukul 20.49 WIB.
- Haboddin, Muhtar. 2012. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, diakses melalui <http://journal.umy.ac.id/index.php/j>

[sp/article/view/152](http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/152) pada tanggal 16 September 2015 pukul 16.28 WIB.

Humaidy, Mohammad A. A. 2007. *Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik di Kalimantan Barat*, diakses melalui <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/142> pada tanggal 16 September 2015 pukul 23.15 WIB.

Jumadi dan Yakoop M. R. 2013. *Etnisitas Sebagai Instrumen Politik dan Keamanan di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru*, diakses melalui <http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/302> pada tanggal 14 September 2015 pukul 15.36 WIB.

Jumadi dan Yakoop M. R. 2013. *Keterwakilan Etnis Dalam Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru*, diakses melalui <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1917> pada tanggal 16 September 2015 pukul 23.47 WIB.

Kotawaringin Barat Dalam Angka 2014. 2015. Diakses melalui <http://kobarkab.bps.go.id/> pada

tanggal 03 Oktober 2015 pukul 08.01 WIB.

Lindayanti dan Witrianto. 2014. *Harmoni Kehidupan pada Masyarakat Plural: Studi Kasus Integrasi Sosial Antar Etnis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*, diakses melalui <http://ijoh.org/index.php/jas/article/view/8> pada tanggal 14 September 2015 pukul 15.53 WIB.

Mahdalena, Lidya. 2012. *Tingkah laku Politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada 2010 di Kota Medan*, diakses melalui <http://202.0.107.5/index.php/dpol/article/view/484> pada tanggal 17 September 2012 pukul 15.39 WIB.

Permana, N. A. 2002. *Revitalisasi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah: Studi Kasus Pulau Bangka*, diakses melalui <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewArticle/3439> pada tanggal 15 September 2012 pukul 20.17 WIB.

Syamsudin, M. 2008. *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, diakses melalui

<http://jurnal.uui.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/view/33> pada tanggal 14 September 2015 pukul 13.42 WIB.

http://googleweblight.com/?lite_url=http://pde.kotawaringinbaratkab.go.id/?page_id%3D260&ei=zy2M7mUM&lc=id-ID&geid=7&s=1&m=473&ts=1443611827&sig=APONPFk7tdaWNLdD4FtTan3OdOiuZ8Vg diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 18.36 WIB.

<http://kbbi.web.id/etnik> diakses pada tanggal 16 September 2015 pukul 23.21 WIB.

<http://kbbi.web.id/politik> diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 15.00 WIB.

<http://kobarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 02 Oktober 2015 pukul 15.06 WIB.

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/23/349000/kronologi-sengketa-pilkada-kotawaringin-barat-2010-yang-menyeret-bw> diakses pada tanggal 12 November 2015 pukul 18.13 WIB.

http://pde.kotawaringinbaratkab.go.id/?page_id=285 diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 19.05 WIB.

<http://www.hubert-herald.nl/IndoKalTen.htm> diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 18.08 WIB.

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/62/name/kalimantan-tengah/detail/6201/kotawaringin-barat> diakses pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 14.46 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Politik> diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 14.26 WIB.

<https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/15/administrasi-kabupaten-kotawaringin-barat/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2015 pukul 14.20 WIB.

<https://sites.google.com/site/belajarmagnet/petasma> diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 14.41 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan

Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

UUD 1945 Pasal 31

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Skripsi

Putri, Masdiyan. 2014. Persepsi Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Terhadap Calon

Presiden Berlatar Belakang Militer (Studi Kasus Pemilu Presiden Tahun 2004, 2009, 2014). *Skripsi*. FISIPOL UMY. Yogyakarta.

Wawancara

Abidin, Zainal interview. 2016. "*Persepsi Politik Etnis*". Jl. Perwira R. T. 10 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Akbar, Robbyan interview. 2016. "*Persepsi Politik Etnis*". Jl. Abdul Ancis R. T. 10 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Anwar, Kaspul interview. 2016. "*Persepsi Politik Etnis*". Jl. Abdul Ancis R. T. 10 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Anwar, Kaspul interview. 2016. "*Persepsi Politik Etnis*". Jl. D. A. H. Hamzah R. T. 04 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dewi, Srita interview. 2016. "*Persepsi Politik Etnis*". Jl. Abdul Ancis R. T. 10 Kelurahan Mendawai

Pangkalan Bun Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Irwandi, Agus interview. 2016. *“Persepsi Politik Etnis”*. Jl. Pra Kesumayuda R. T. 08 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ruslan, Muhammad interview. 2016. *“Persepsi Politik Etnis”*. Jl. Pra Kesumayuda R. T. 05 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sumardiah interview. 2016. *“Persepsi Politik Etnis”*. Jl. Abdul Ancis R. T. 10 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.